



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 473345

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.816.160.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/21 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 125.683.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 187.352.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 187.352.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 220.023.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/75 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 195.400.000
6. Tanah Seluas 100 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/116 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
8. Tanah Seluas 570 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1502 m2/100 m2 di NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 386.000.000
10. Tanah Seluas 100 m2 di KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
11. Tanah Seluas 78 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 152.350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **473.650.000**

1. MOBIL, INOVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 210.500.000



2. MOTOR, SHOGUN BLUE Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
750.000
3. MOTOR, YAMAHA SCOPPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
2.400.000
4. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 390.100.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.679.910.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.679.910.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.